

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan persekolahan sudah sejak lama diakui sebagai lembaga yang mampu dijadikan wadah dan wahana untuk mempersiapkan, membina dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia berkualitas yang dimaksud adalah manusia yang secara sadar mau dan mampu mengembangkan diri, dan mengaktualisasikan kemampuannya dalam pembangunan bangsa dan masyarakat sekitarnya. Penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut, termuat dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, sebagai berikut :

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, dan mandiri. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa kesetiakawanan sosial. Sehubungan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan dan memperdalam rasa percaya diri serta sikap perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (GBHN, 1993).

Dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang diharapkan oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya yang tidak hanya berkualitas dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga berkualitas dari segi spiritual. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan berarti apabila tidak didukung dengan sikap dan perilaku yang baik, yang tetap berpegang pada kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai oleh

bangsa Indonesia adalah kemajuan yang tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Bagi bangsa Indonesia, upaya untuk menanamkan serta memantapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan kehidupan bernegara merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya tersebut telah dilakukan melalui matapelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di tingkat sekolah dasar dan menengah; melalui pendidikan Pancasila dan Kewiraan di tingkat perguruan tinggi; serta melalui penataran P4 bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Sejalan dengan upaya di atas, dalam pelaksanaan program pendidikan Pancasila di sekolah, telah pula dilakukan langkah-langkah yang memungkinkan dapat terbinanya sikap dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Berbagai pembenahan dan penyempurnaan telah dilakukan, diantaranya adalah perubahan dan penyempurnaan matapelajaran PMP menjadi PPKN. Melalui PPKN, nilai-nilai Pancasila diharapkan secara utuh dan bulat dapat dijadikan pola berpikir, sikap dan perilaku. Oleh karena itu, dalam pengajarannya tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tentang Pancasila, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mengembangkan, membina, dan menanamkan nilai-nilai moral Pancasila agar benar-benar dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat (Depdikbud, 1994).

Selama ini pelaksanaan program semacam PMP/PPKN masih mengalami berbagai hambatan dan permasalahan, antara lain : (1) masih besarnya konsep berpikir masa lalu, seperti civics maupun kewargaan negara; (2) masih besarnya komponen ilmu pengetahuan tertentu yang berperan dalam pengajaran PMP, seperti sejarah, tata negara, dan etika; (3) masih besarnya bidang keahlian yang dimiliki oleh pembina, berpengaruh terhadap PMP; (4)

kurang jelasnya pola uraian, terutama uraian yang benar-benar PMP; (5) kurang biasanya guru-guru membedakan fakta yang bernilai moral dengan fakta yang bernilai ilmiah; (6) kurangnya keterampilan guru dalam memilih metodologi dan sarana pengajaran PMP; (7) belum adanya sikap memberi contoh dalam bentuk tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari; (8) lemahnya kemampuan dan pengalaman guru dalam menyusun alat evaluasi terutama yang beraspek moral (Dirjen. Dikdasmen, 1984).

Nu'man (1995) mengatakan bahwa masalah dan kekeliruan yang sering timbul dalam pelaksanaan program semacam PPKN karena sifat substansinya sebagian besar berisikan konsep yang secara konstitusional sudah resmi menjadi moral bangsa. Lebih lanjut dikatakan bahwa, guru-guru untuk mudahnya cenderung menggunakan *method of authority* dan ceramah, yaitu metode belajar yang hanya mengandalkan wibawa guru dan kurang berdasarkan atas pertimbangan teori belajar. Guru menuntut agar isi pelajaran dan buku wajib untuk dikuasai peserta didik. Karena itu, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa isi dan metode PPKN itu sangat membosankan karena hanya untuk dihafalkan saja (Depdikbud, 1994).

Kondisi seperti di atas menyebabkan pengajaran PMP/PPKN di sekolah menjadi kurang bermakna bagi siswa, serta minat dan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Semua itu akan bermuara pada rendahnya prestasi belajar siswa dalam pengajaran PMP/PPKN. Ini terungkap dari beberapa hasil penelitian. Diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Jayanegara, dkk. (1991) menemukan bahwa pelaksanaan pengajaran PMP pada sekolah dasar di Bali masih belum mencapai hasil yang maksimal. Penyebabnya adalah karena masih dominannya penggunaan metode ceramah, sehingga siswa sering merasa bosan karena hanya disuruh mencatat dan mendengarkan saja. Sementara itu hasil studi Nasution (1992) yang dilakukan terhadap siswa sekolah dasar di Bogor, menemukan bahwa nilai atau hasil maksimal yang

dicapai untuk matapelajaran matematika tidak jauh berbeda dengan hasil maksimal yang dicapai siswa dalam matapelajaran PMP dan IPS. Bahkan yang sulit dimengerti dari hasil studi itu adalah bahwa nilai terburuk siswa secara perorangan justru bukan pada matapelajaran matematika, melainkan pada matapelajaran PMP dan IPS. Berkaitan dengan pola pengajaran, penelitian Puspa (1993) menemukan bahwa pola pengajaran yang dilakukan guru PMP/PPKN lebih bersifat pemberian pengetahuan tentang Pancasila daripada pembinaan moral dan sikap siswa.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran PMP/PPKN selama ini masih belum memenuhi harapan, baik dilihat dari segi proses maupun hasil perolehannya. Bahan ajar PMP/PPKN selama ini masih padat dengan konsep normatif teoritik dengan pola penilaian yang seluruhnya formal di kelas (Kosasih, 1994). Hal ini mungkin disebabkan oleh model pembelajaran yang dianut guru didasarkan atas asumsi tersembunyi, bahwa PMP/PPKN adalah pengetahuan tentang Pancasila yang dapat secara utuh disampaikan dari pikiran guru ke pikiran siswa. Atas dasar asumsi itu, mungkin saja guru merasa telah mengajar dengan baik namun siswanya tidak belajar. Dalam arti belum terjadi proses internalisasi nilai sebagaimana misi dan ciri dari PMP/PPKN yang pada hakekatnya adalah pendidikan nilai, moral dan norma Pancasila (Kosasih, 1994).

Permasalahan yang secara umum dihadapi dalam pembelajaran PMP/PPKN selama ini, tampaknya terjadi pula dalam pembelajaran PPKN pada sekolah-sekolah dasar di Kota Singaraja-Bali, khususnya di SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja. Hal tersebut terungkap dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di dua sekolah dasar yang bersangkutan dalam rangka penyusunan rancangan penelitian ini.

Untuk itu melalui penelitian ini, urgen ditawarkan suatu model belajar dengan menggunakan Teknik Klarifikasi Nilai atau yang sering disebut dengan

model VCT (*Value Clarification Tehcnique*), yaitu suatu strategi yang memungkinkan partisipasi aktif peserta didik, dapat mengarahkan pembelajaran pada tujuan, dan memungkinkan terjadinya proses internalisasi nilai-moral melalui cara-cara yang rasional, komunikatif dan edukatif sehingga siswa menjunjung tinggi nilai yang dianutnya secara kukuh dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila.

Pengajaran dengan model VCT dalam PPKN dirasakan cukup relevan karena dapat menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif (Misbah, 1987). Siswa tidak saja menerima secara pasif apa yang diberikan guru melalui indoktrinasi, tetapi kepada siswa diharapkan aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah sosial di sekitarnya dan bersama-sama guru lebih bebas memecahkan masalah secara kritis dan bermanfaat (Cheppy, 1988). Dengan keterlibatan secara aktif, diharapkan seluruh aspek kepribadian siswa terpengaruh dan berkembang secara wajar agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Atas dasar permasalahan dan temuan hasil penelitian selama ini, tampaknya cukup relevan dipersoalkan apakah Teknik Klarifikasi Nilai (VCT) dapat diterapkan pada pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)? Jika dapat, bagaimanakah peranannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN? Apakah VCT dapat digunakan untuk melakukan pembinaan nilai dan penalaran moral serta sikap sebagai salah satu bagian dari pengajaran Pendidikan Pancasila di sekolah? Adakah segi pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya secara berdaya dan berhasil guna? Adakah unsur-unsur muatan lokal yang dapat disisipkan pada pengajaran PPKN melalui penerapan Teknik Klarifikasi Nilai (VCT) tersebut?

Kontribusi yang mungkin diberikan melalui penelitian yang didesign dengan mengembangkan model VCT ini, antara lain : (1) memberikan motivasi kepada para guru agar kebiasaan mengajar yang selama ini terkesan kaku dan cenderung hanya menggunakan metode ceramah dan hanya berorientasi

pada buku teks sebagai sumber belajar, dapat bergeser menuju penggunaan model belajar yang bermakna sesuai dengan misi dan ciri PPKN sebagai pendidikan nilai dan moral serta norma Pancasila; (2) membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PPKN; (3) meningkatkan prestasi belajar siswa dalam matapelajaran PPKN, terutama pada aspek penalaran nilai-moralnya.

B. Ruang Lingkup dan Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan yang berfokus pada pengembangan Model Klarifikasi Nilai (VCT) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Model VCT yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi : (1) model pengenalan konsep nilai-moral; dan model penalaran nilai-moral sesuai dengan pokok bahasan yang disajikan. Untuk pengenalan konsep nilai-moral dikembangkan VCT model permainan (*Games*); dan untuk penalaran nilai-moral dikembangkan VCT model Percontohan (*Exampleritorik*).

Penelitian ini dilakukan pada dua sekolah dasar, yaitu di SD Laboratorium STKIP Singaraja dan SD 4 Kampung Baru. pada kelas IV catur wulan II. Pengembangan model VCT ini dilakukan pada pembelajaran pokok bahasan tanggung jawab dan kepentingan umum.

Pelaksanaan penelitian ini mencakup beberapa metode secara *synergik*, yaitu metode *survey* untuk mengidentifikasi masalah dan isu-isu sentral di lapangan berkaitan dengan permasalahan pengajaran PPKN, metode diskusi secara mendalam untuk pengembangan model dan validasinya, metode eksperimen dan dilanjutkan dengan studi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya.

Bertolak dari latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian, dirumuskan permasalahan yang dapat dijabarkan berdasarkan jenis dan tahapan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang profil awal pembelajaran PPKN pada SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja- Bali?
2. Bagaimanakah dapat dikembangkan model pembelajaran PPKN dengan penerapan VCT pada siswa kelas IV sesuai dengan pokok bahasan dalam kurikulum PPKN1994?
3. Bagaimanakah kemungkinan dapat disepakati penerapan model VCT dalam pembelajaran PPKN oleh guru?
4. Bagaimanakah kualitas pembelajaran PPKN yang dilaksanakan dengan model VCT pada siswa kelas IV SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja?

Permasalahan yang keempat ini dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualitas pengajaran guru dalam pembelajaran PPKN yang menggunakan model VCT pada pengajaran pokok bahasan tanggung jawab dan kepentingan umum di kelas IV SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja-Bali?
- 2) Bagaimanakah interaksi/respon siswa kelas IV SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja dalam pembelajaran PPKN yang dilaksanakan dengan model VCT?
- 3) Bagaimanakah hasil belajar siswa kelas IV SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja dalam pembelajaran PPKN untuk pokok bahasan tanggung jawab dan kepentingan umum dengan menggunakan model VCT?
- 4) Adakah perbaikan kualitas pembelajaran PPKN yang terjadi antara sebelum dengan sesudah dilakukan tindakan pengembangan model VCT?

- 5) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan VCT dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar?

C. Definisi Operasional

Beberapa kontruk, konsep dan istilah dalam penelitian ini perlu diberi penjabaran untuk memperoleh kesamaan persepsi mengenai kontruk. konsep dan istilah tersebut, antara lain :

1. Teknik Klarifikasi Nilai (VCT)

Teknik Klarifikasi Nilai (VCT) adalah model belajar yang memusatkan pada dan berorientasi kearah pengungkapan konsep dan terbinanya proses penalaran nilai-moral, yang dicirikan oleh adanya langkah-langkah kegiatan (1) penyampaian stimulus berupa permainan, kasus atau ceritera yang mengandung problematika dan klonflik nilai-moral; (2) diskusi dan klarifikasi nilai-moral; dan (3) penekanan/pembinaan nilai-moral sesuai target pengajaran.

2. Pembelajaran (Proses Belajar Mengajar)

Pembelajaran (Proses Belajar Mengajar) adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan/interaksi guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi *edukatif* untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Kualitas Pembelajaran PPKN

Dimaksudkan di sini adalah kualitas proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKN yang akan digambarkan dari pola interaksi guru-siswa dalam kegiatan belajar-mengajar dan perolehan hasil belajar siswa dalam matapelajaran PPKN.

4. Pola Interaksi Belajar Mengajar

Pola interaksi belajar mengajar adalah pola hubungan antara guru-siswa yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dikatakan berinteraksi apabila terjadi isi-mengisi, tukar-menukar dan atau saling meradiasi.

5. Hasil belajar

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penguasaan siswa terhadap konsep dan penalaran nilai-moral serta sikap sesuai dengan pokok bahasan/materi yang diajarkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tes hasil belajar yang akan lebih ditekankan pada aspek pemahaman konsep, penghayatan dan penalaran atas nilai-moral yang diajarkan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian tindakan ini adalah untuk mengembangkan model VCT dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Secara lebih rinci/spesifik, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang awal profil pembelajaran PPKN pada sekolah-sekolah dasar di kota Singaraja, khususnya di SD 4 Kampung Baru dan di SD laboratorium STKIP Singaraja-Bali.
2. Mengembangkan suatu model pengajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik, misi dan tujuan PPKN dengan menggunakan Teknik Klarifikasi Nilai (VCT) di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum PPKN 1994.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kualitas proses pembelajaran PPKN dengan menggunakan VCT di SD 4 Kampung Baru dan SD Laboratorium STKIP Singaraja-Bali.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKN dengan model VCT, yang berkaitan dengan penguasaan konsep, sikap dan penalaran.
5. Mengidentifikasi dan menganalisis perbaikan kualitas pembelajaran PPKN antara sebelum dan sesudah dilakukan tindakan pengembangan model VCT.

6. Menemukanali kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model VCT serta kemungkinan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Temuan hasil penelitian ini akan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran PPKN. Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi guru sekolah dasar selaku praktisi, khususnya yang membina matapelajaran PPKN, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, bahan acuan atau pedoman yang bersifat alternatif untuk dapat dikembangkan, diterapkan dan disesuaikan dengan keadaan setempat dalam melaksanakan pengajaran PPKN.
2. Bagi siswa, hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran PPKN, meningkatkan kreativitas dan penalaran moral siswa serta mengubah persepsi dan citra siswa berkaitan dengan pengajaran PPKN di sekolah.
3. Bagi penyelenggara program D-II PGSD, hasil penelitian ini secara tidak langsung akan memberikan informasi kebijakan untuk penyempurnaan kurikulum, khususnya dalam mata kuliah PPKN (baik dari segi materi maupun metodologi pengajarannya) serta dalam pembinaan PPL mahasiswa di sekolah-sekolah dasar. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermamfaat bagi penyelenggara program pascasarjana, khususnya Pascasarjana yang menyelenggarakan program S2 PGSD.
4. Bagi teoritisi pendidikan pada umumnya, khususnya teoritisi PPKN dan pengembang kurikulum di tingkat atas/pusat, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan, khususnya untuk matapelajaran PPKN.

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau landasan untuk mengkaji permasalahan pelaksanaan program PPKN dalam ruang lingkup yang lebih mendalam dengan aspek kajian yang lebih luas.